



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Stabilitas dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

11. Peraturan Pemerintah...../3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partial Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah...../4

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri...../5

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
32. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
33. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
34. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-40 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 11).
38. Peraturan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :...../6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.477.195.665.534,00

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.640.291.587,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.495.348.993,00
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.140.584.091,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.900.532.900,00
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.103.825.603,00

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 32.495.348.993,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp. 4.324.000.000,00
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp. 4.433.615.933,00

c. Pajak...../7

- c. Pajak Hiburan sebesar Rp. 1.553.966.500,00
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp. 1.114.500.000,00
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 10.000.000.000,00
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp. 800.000.000,00
 - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp. 350.000.000,00
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 300.000.000,00
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp. 4.800.000.000,00
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 2.000.000.000,00
 - k. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 2.075.694.720,00
 - l. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 743.571.840,00
- (2) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 10.140.584.091,00 yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 2.435.788.000,00
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 2.552.180.000,00
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp. 5.152.616.091,00
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 1.900.532.900,00 yang terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp. 1.900.532.900,00
- (4) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.103.825.603,00 yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp. 300.000.000,00
 - b. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp. 1.000.000.000,00
 - c. Pendapatan Bunga Rp. 500.000.000,00
 - d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp. 2.303.825.603,00
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.317.355.373.947,00 yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.293.057.507.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 24.297.866.947,00

Pasal 6...../8

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan Lain -lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.200.000.000,00 yang terdiri atas:
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 110.200.000.000

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.519.345.665.534,00 yang terdiri atas :
- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.093.789.583.458,00 yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 499.785.054.805,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 514.143.071.253,00
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 69.057.879.400,00
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.803.578.000,00

Pasal 9...../9

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.536.369.297,00 yang terdiri atas :
 - a. belanja Modal Tanah
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.330.000.000,00
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.887.170.437,00
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.810.406.050,00
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.898.792.810,00
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.290.000.000,00
- (7) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 320.000.000,00

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 yang terdiri atas :
 - a. belanja Tidak Terduga
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 270.019.712.779,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 270.019.712.779,00

Pasal 12...../10

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 42.720.000.000,00 terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.720.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 975.000.000,00
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 41.745.000.000,00
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 570.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran...../11

- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0.
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 570.000.000.
 - (4) Pemberian cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 0,00
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 0,00

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Biak Numfor ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV...../12

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati Biak Numfor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap...../13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 31 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
ZACHARIAS LEONARD MAILOA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DJAMLATI, MM
NIP. 197201062005022005



KABUPATEN BIAK NUMFOR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.640.291.587,00
4.1.01	Pajak Daerah	32.495.348.993,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.324.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.312.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.312.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	12.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	12.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.433.615.933,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.002.215.933,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.002.215.933,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	33.300.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	33.300.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	46.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	46.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.100.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.100.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	275.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	275.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	75.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	75.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.553.966.500,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.350.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.350.000.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5.900.000,00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	5.900.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	570.500,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	570.500,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	196.296.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	196.296.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.200.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.200.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.114.500.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	700.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	700.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	266.300.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	266.300.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	82.500.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	82.500.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	65.700.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	65.700.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	10.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	800.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	800.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	800.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	350.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	350.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.800.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.800.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.800.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.075.694.720,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	2.075.694.720,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	2.075.694.720,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	743.571.840,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	743.571.840,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	743.571.840,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.140.584.091,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.435.788.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.110.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.050.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	60.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	500.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	500.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	125.788.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	125.788.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.552.180.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.447.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.445.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.000.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.000.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	50.200.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	50.200.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	13.840.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	13.840.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	41.140.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	41.140.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.152.616.091,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.147.616.091,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.147.616.091,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.900.532.900,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.900.532.900,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.900.532.900,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.900.532.900,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.103.825.603,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	300.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	300.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	500.000.000,00
4.1.04.05.08	Jasa Giro pada Rekening Kas Otonomi Khusus	0,00
4.1.04.05.08.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	0,00
4.1.04.05.08.0002	Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.303.825.603,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.303.825.603,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.303.825.603,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.317.355.373.947,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.293.057.507.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	189.390.136.000,00
4.2.01.03.08	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	83.132.671.000,00
4.2.01.03.08.0003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	83.132.671.000,00
4.2.01.03.11	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua	95.020.981.000,00
4.2.01.03.11.0001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	28.506.294.300,00
4.2.01.03.11.0002	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	19.004.196.200,00
4.2.01.03.11.0003	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	47.510.490.500,00
4.2.01.03.12	DTI-Papua	11.236.484.000,00
4.2.01.03.12.0001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	11.236.484.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	186.839.911.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	186.839.911.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	186.839.911.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	10.349.726.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	7.001.479.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	943.268.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.058.211.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	3.348.247.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	338.146.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	3.010.101.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	651.120.501.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	481.472.947.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	481.472.947.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	169.647.554.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.800.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	28.923.063.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	75.251.353.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	31.179.876.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	31.493.262.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	255.357.233.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	99.828.253.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	299.974.000,00
4.2.01.09.01.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	872.009.000,00
4.2.01.09.01.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	4.382.513.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.800.289.000,00
4.2.01.09.01.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	100.000.000,00
4.2.01.09.01.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	46.180.189.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	24.317.279.000,00
4.2.01.09.01.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	14.876.000.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	155.528.980.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	54.820.502.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	843.250.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	43.748.848.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.836.500.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	13.866.349.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.483.576.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	1.059.650.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	489.582.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.260.283.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	26.120.440.000,00
4.2.01.09.02.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.297.866.947,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	24.297.866.947,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	24.297.866.947,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.144.992.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.126.624.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.504.293.788,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	17.719.729,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.504.237.430,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	110.200.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.200.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	110.200.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	110.200.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	110.200.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.477.195.665.534,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.093.789.583.458,00
5.1.01	Belanja Pegawai	499.785.054.805,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	378.853.906.040,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	260.224.388.503,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	206.741.185.103,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	53.483.203.400,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.445.630.700,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.795.294.700,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.650.336.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.168.009.710,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.168.009.710,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.565.139.330,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.564.028.130,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.001.111.200,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.913.039.200,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.678.959.200,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	234.080.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	23.367.363.121,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.132.623.121,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.234.740.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.878.932.742,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.827.132.742,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	51.800.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	46.996.212,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.630.422,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.365.790,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.406.862.859,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.818.732.179,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.588.130.680,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	685.508.550,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	561.093.006,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	124.415.544,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.857.983.284,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.486.133.084,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	371.850.200,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	29.294.051.829,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	29.294.051.829,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	95.468.381.745,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	39.821.852.136,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	39.359.852.136,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	462.000.000,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.000.000,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	12.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.514.532.600,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.514.532.600,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.119.997.009,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	38.417.148.009,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	13.866.349.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.836.500.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.426.947.620,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	695.310.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	695.310.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	241.521.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	241.521.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	154.730.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	154.730.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	70.842.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	70.842.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.047.517.600,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.047.517.600,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	70.281.300,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	70.281.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.202.900,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.202.900,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.906.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.906.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	976.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	976.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	285.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	285.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.533.052.820,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	567.331.412,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.721.408,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	100.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.860.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.120.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.120.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	297.990.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	297.990.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	972.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	720.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	720.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	5.063.819.400,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	5.063.819.400,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	5.063.819.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.143.071.253,00
5.1.02.01	Belanja Barang	160.355.334.404,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	160.339.734.404,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	931.537.160,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.329.938.608,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	308.804.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.096.290.600,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	314.500.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.676.406.083,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	470.305.300,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	25.298.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.681.191.546,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.662.151.020,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.389.792.340,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	537.532.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.265.299.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	809.649.240,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	409.569.390,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	68.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.760.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.103.745.650,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	455.129.300,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	53.312.382.290,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.849.212.720,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.796.819.907,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.053.213.950,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.976.310.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.397.140.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	47.300.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.362.073.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	531.673.200,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.078.266.800,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	142.178.400,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	35.935.200,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.081.213.200,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	141.350.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	929.750.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	65.472.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	170.740.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	813.804.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	15.600.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	138.826.166.744,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	98.687.748.994,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.650.780.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.862.850.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.264.250.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	63.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	15.390.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	139.700.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	285.700.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	560.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13.153.702.400,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.084.802.023,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	184.651.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	248.650.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.762.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	775.200.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	11.250.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	224.400.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	680.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.836.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.848.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	149.700.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	949.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.471.100.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.801.700.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	986.800.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	69.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	375.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	21.800.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	75.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	844.250.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	121.103.500,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	92.400.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	195.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	752.500.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0058	Belanja Jasa Penyelaman	16.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	83.745.920,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.401.423.038,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.739.674.113,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	300.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.382.659.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.629.438.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	256.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.303.780.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	250.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.075.200.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	603.850.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.319.989.200,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.200.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.999.203.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.786.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.980.480.950,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.176.754.600,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	463.354.200,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	237.068.800,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.897.880.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	69.539.800,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.579.395.800,00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	16.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	330.487.750,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	207.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.893.218.600,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	210.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.072.113.600,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	520.000.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	91.105.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	214.000.000,00
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	214.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	440.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	40.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	400.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	500.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	500.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	3.745.850.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	2.305.850.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.040.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	400.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.044.879.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.389.879.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	415.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	240.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.559.231.505,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.762.816.468,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	120.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.071.340.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	99.200.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	75.292.800,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	96.142.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	462.400.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	152.002.068,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	283.747.600,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.692.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	730.989.537,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	470.989.537,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	260.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.401.225.500,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.350.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	21.225.500,00
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	30.000.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	664.200.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	664.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	83.421.585.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	83.411.585.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.646.620.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.010.695.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.754.270.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	10.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	10.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.339.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	869.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	799.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	70.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	470.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	470.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	24.641.753.600,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	21.098.527.600,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	20.255.277.600,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	843.250.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	2.483.576.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	2.468.576.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	1.059.650.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.059.650.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.000.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.000.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.000.000.000,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.000.000.000,00
5.1.03.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	1.000.000.000,00
5.1.03.02.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	1.000.000.000,00
5.1.03.02.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	1.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	69.057.879.400,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	47.871.173.400,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.112.229.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.112.229.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.618.744.400,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	25.618.744.400,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.470.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.470.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	970.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	970.000.000,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	10.550.200.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	10.550.200.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	18.687.826.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.668.631.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.668.631.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	6.019.195.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	6.019.195.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.373.880.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	2.373.880.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	2.373.880.000,00
5.1.05.09	Belanja Hibah kepada BUMDesa	125.000.000,00
5.1.05.09.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa	125.000.000,00
5.1.05.09.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa	125.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.803.578.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.318.578.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.318.578.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.318.578.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	140.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	140.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	140.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	345.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	345.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	345.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	153.536.369.297,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.330.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	11.330.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	11.330.000.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	11.330.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.887.170.437,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.173.435.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.623.435.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	781.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	492.435.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.150.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.800.000.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	750.000.000,00
5.2.02.02.04.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	750.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	134.203.860,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	134.203.860,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	134.203.860,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	244.680.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	244.680.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	239.880.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	4.800.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.239.402.737,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	533.744.994,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.504.200,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	510.240.794,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.410.765.343,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	684.923.773,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	323.321.430,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	402.520.140,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	294.892.400,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	125.500.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	163.800.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	5.592.400,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	46.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	31.500.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	31.500.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	15.000.000,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	15.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	214.633.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	214.633.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	214.633.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	505.730.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	105.730.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	105.730.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	400.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	400.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.571.788.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.607.444.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	851.863.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	755.581.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	964.344.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	697.575.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	23.994.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	242.775.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	679.098.840,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	599.940.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	349.940.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	250.000.000,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	79.158.840,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	79.158.840,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	425.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	425.000.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	425.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	213.000.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	213.000.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	213.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	8.439.699.000,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	8.439.699.000,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	8.439.699.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.810.406.050,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	27.409.574.050,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.912.685.020,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.654.697.700,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	403.577.850,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.351.802.500,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.452.696.570,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	850.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.710.060.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	25.000.000,00
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	2.698.697.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	344.683.890,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	3.371.469.510,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.496.889.030,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	802.037.635,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.250.477.250,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	444.374.145,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	330.000.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	330.000.000,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	330.000.000,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	20.832.000,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	20.832.000,00
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	20.832.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	50.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	50.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.898.792.810,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	78.375.570.510,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	78.375.570.510,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	75.720.570.510,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.590.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.065.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.839.500.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	5.710.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5.710.000.000,00
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	129.500.000,00
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	129.500.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.683.722.300,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.683.722.300,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.683.722.300,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.290.000.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.290.000.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.290.000.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	90.000.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.200.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	320.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	320.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	320.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	320.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	270.019.712.779,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	270.019.712.779,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	66.147.022.700,00
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	66.147.022.700,00
5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	66.147.022.700,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	17.032.779.079,00
5.4.02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	17.032.779.079,00
5.4.02.04.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	17.032.779.079,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	186.839.911.000,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	186.839.911.000,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	186.839.911.000,00
	Jumlah Belanja	1.519.345.665.534,00
	Total Surplus/(Defisit)	-42.150.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	42.720.000.000,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	975.000.000,00
6.1.03.02	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	975.000.000,00
6.1.03.02.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD	975.000.000,00
6.1.03.02.01.0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD	975.000.000,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	41.745.000.000,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	41.745.000.000,00
6.1.04.03.07	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	41.745.000.000,00
6.1.04.03.07.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	41.745.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	570.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	570.000.000,00
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	570.000.000,00
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	570.000.000,00
6.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	570.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	570.000.000,00
	Pembiayaan Netto	42.150.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Biak Numfor, 31 Desember 2024

Pj. Bupati



SOFIA BONSAPIA